



POLICY BRIEF



ANALISIS MODEL PENGELOLAAN SAMPAH KOTA MAKASSAR 2025



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MAKASSAR
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

POLICY BRIEF

Kajian Model Pengelolaan Sampah di Kota Makassar Tahun 2025

'Mewujudkan Makassar Bersih dan Berkelanjutan: Menggeser Paradigma Menuju Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat'

Ringkasan Eksekutif

Kota Makassar menghadapi krisis pengelolaan sampah yang mendesak, ditandai dengan volume timbunan harian yang mencapai 4.500-5.000 m³ di samping itu kapasitas TPA Antang yang semakin terbatas menjadi *constraint* yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pendekatan konvensional pengelolaan sampah yang berpusat pada pemerintah terbukti tidak lagi memadai untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor paling krusial (bobot AHP 0,2182) dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Sementara analisis juga menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif dan prioritas untuk diimplementasikan adalah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di tingkat Komunitas (skor prioritas 0,2622) dan gerakan Kompos Mandiri di tingkat rumah tangga (skor 0,2485).

Ringkasan kebijakan ini merekomendasikan pergeseran strategis dari model terpusat ke model pengelolaan sampah terintegrasi yang memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama. Rekomendasi utama berfokus pada: (1) Prioritas penguatan dan perluasan TPS3R Komunitas dan Kompos Mandiri, (2) Revitalisasi Bank Sampah sebagai instrumen insentif ekonomi, dan (3) Penciptaan kerangka regulasi yang mendukung kemitraan dan edukasi berkelanjutan.

Pendahuluan: Krisis Sampah di Ambang Pintu

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, pertumbuhan pesat Kota Makassar membawa konsekuensi serius pada peningkatan volume sampah. Setiap harinya, kota ini menghasilkan antara 4.500 hingga 5.000 meter kubik sampah, yang sebagian besar berakhir di TPA Antang. Laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memproyeksikan TPA Antang akan mencapai titik jenuh (*overload*) dalam beberapa tahun ke depan jika tidak ada intervensi signifikan.

Sistem pengelolaan sampah yang selama ini berjalan dengan model konvensional "kumpul-angkut-buang" menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya penanggung jawab. Model ini tidak hanya membebani anggaran daerah secara operasional, tetapi juga gagal menyentuh akar permasalahan, yaitu perilaku masyarakat dan minimnya pengelolaan sampah di sumber. Di sisi lain, berbagai inisiatif berbasis masyarakat seperti Bank Sampah seringkali berjalan sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan kota.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian ini hadir untuk memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based) guna menentukan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang paling sesuai untuk kondisi Kota Makassar.

Temuan Utama: Partisipasi Masyarakat adalah Kunci

Analisis menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) terhadap berbagai kriteria dan alternatif strategi menghasilkan tiga temuan utama yang krusial bagi perumusan kebijakan.

Temuan 1: Partisipasi Masyarakat adalah Faktor Penentu Paling Dominan.

Dari lima kriteria yang dianalisis (Partisipasi Masyarakat, Efisiensi, Keberlanjutan, Efektivitas, serta Kelembagaan dan Regulasi), Partisipasi Masyarakat memperoleh bobot prioritas tertinggi (0,2182). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan setiap program pengelolaan sampah lebih bergantung pada keterlibatan aktif warga dibandingkan faktor lainnya. Saat ini, tingkat partisipasi masyarakat mayoritas masih berada pada level "Sedang" (49%). Ini menandakan adanya kesadaran awal yang perlu ditingkatkan menjadi kebiasaan yang konsisten melalui intervensi kebijakan yang tepat.

Temuan 2: Strategi Berbasis Komunitas adalah yang Paling Prioritas.

Saat membandingkan lima alternatif strategi, AHP menunjukkan bahwa strategi yang memberdayakan pengelolaan di tingkat komunitas dan rumah tangga memiliki prioritas tertinggi.

- TPS3R Komunitas (Skor Global: 0,2622) menjadi pilihan teratas. Strategi ini dinilai paling komprehensif karena mampu mengurangi sampah di sumber, memberdayakan warga secara kolektif, dan sangat efektif menekan volume sampah yang diangkut ke TPA.
- Kompos Mandiri (Skor Global: 0,2485) menempati urutan kedua. Mengingat sampah organik mendominasi komposisi sampah kota, strategi ini sangat efektif dan efisien untuk diimplementasikan di tingkat rumah tangga.
- Bank Sampah RT/RW (Skor Global: 0,2021) berada di urutan ketiga. Bank Sampah tetap menjadi instrumen penting sebagai pendorong motivasi ekonomi bagi warga untuk memilah sampah anorganik, meskipun menghadapi tantangan keberlanjutan kelembagaan.

Temuan 3: Kemitraan Swasta dan Edukasi adalah Strategi Pendukung Krusial.

Strategi Kemitraan dengan Pihak Swasta (skor 0,1685) dan Edukasi & Insentif (skor 0,1187) menempati peringkat lebih rendah. Ini tidak berarti keduanya tidak penting, namun perannya lebih sebagai pendukung sistem. Kemitraan swasta dibutuhkan untuk inovasi teknologi dan akses pasar daur ulang, sementara edukasi dan insentif menjadi fondasi untuk perubahan perilaku jangka panjang dan keberlanjutan budaya peduli lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, diperlukan pergeseran kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan:

Rekomendasi 1: *Prioritaskan Penguatan dan Perluasan TPS3R Komunitas dan Gerakan Kompos Mandiri. Pemerintah Kota Makassar perlu menjadikan pengembangan TPS3R dan Kompos Mandiri sebagai program unggulan.*

Rencana Aksi:

1. Alokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk pembangunan infrastruktur TPS3R di kelurahan-kelurahan prioritas serta untuk subsidi pengadaan alat komposter sederhana bagi rumah tangga.
2. Bentuk Tim Pendamping Teknis dari DLH dan akademisi untuk memberikan pelatihan manajemen, operasional, dan pemasaran produk (kompos, barang daur ulang) kepada pengelola TPS3R dan kelompok masyarakat.
3. Integrasikan Peran Kecamatan dan Kelurahan sebagai fasilitator dan monitor utama keberlangsungan program di wilayahnya.

Rekomendasi 2: *Revitalisasi dan Integrasikan Program Bank Sampah sebagai Instrumen Insentif. Agar Bank Sampah lebih berdaya, perannya harus diperkuat dari sekadar inisiatif sporadis menjadi bagian terintegrasi dari sistem pengelolaan sampah kota.*

Rencana Aksi:

1. Buat Regulasi Retribusi Berbasis Pemilahan: Kembangkan skema di mana rumah tangga yang aktif menyeter sampah terpilah ke Bank Sampah mendapatkan pengurangan atau insentif pada iuran retribusi sampah bulanan.

2. Fasilitasi Rantai Pasok Daur Ulang: Pemerintah Daerah perlu menjembatani kemitraan antara Bank Sampah unit dengan Bank Sampah Induk dan industri daur ulang untuk menjamin penyerapan material dan harga yang stabil.
3. Tingkatkan Kapasitas Pengelola: Adakan pelatihan manajemen keuangan dan administrasi secara rutin bagi para pengurus Bank Sampah untuk meningkatkan profesionalisme dan keberlanjutan operasional.

Rekomendasi 3: *Ciptakan Kerangka Regulasi yang Mendukung Kemitraan dan Edukasi Berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang, peran swasta dan perubahan budaya masyarakat perlu didukung oleh kebijakan yang jelas.*

Rencana Aksi:

1. Kembangkan Skema Insentif Investasi Hijau: Berikan insentif fiskal (misalnya, pengurangan pajak daerah) bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam teknologi pengolahan sampah, atau yang menjalankan program CSR untuk mendukung TPS3R dan Bank Sampah di sekitarnya.
2. Perkuat Kampanye Publik: Program seperti "Makassar Tidak Rantasa" perlu diperluas fokusnya, tidak hanya pada kebersihan visual tetapi juga pada edukasi pemilahan sampah dari sumber dan gaya hidup minim sampah.
3. Integrasikan Edukasi Lingkungan: Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan materi pengelolaan sampah praktis ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah.

Rekomendasi 4: *Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas melalui sinergi antara penguatan kelembagaan formal (top-down) dan pemberdayaan masyarakat (bottom-up) dengan mengedepankan prinsip kolaboratif, desentralistik, dan partisipatif.*

Rencana Aksi:

1. Revisi kebijakan daerah (Perda/Perwali) untuk melegitimasi model pengelolaan sampah berbasis RT/RW.
2. Penguatan kelembagaan dan pendampingan Bank Sampah RT/RW melalui kader lingkungan dan pelatihan rutin.
3. Alokasi Dana Kelurahan/DAU untuk pengadaan sarana dan operasional TPS3R atau kompos mandiri.
4. Kampanye edukasi & insentif partisipatif melalui sekolah, rumah ibadah, dan aplikasi pelaporan warga

Rekomendasi 5: *Penggunaan Teknologi Insinerasi Secara Selektif dan Terintegrasi*

Rencana Aksi:

1. Penyusunan regulasi lingkungan & SOP teknis insinerasi sesuai prinsip emisi rendah dan kontrol residu.
2. Pelibatan warga dan pengelola sampah lokal dalam pemantauan dan evaluasi operasional insinerator.
3. Sinergi dengan sistem pemilahan dan bank sampah agar hanya sampah residu yang masuk insinerator.

Kesimpulan

Mengatasi permasalahan sampah di Kota Makassar menuntut lebih dari sekadar penambahan armada truk atau perluasan TPA. Diperlukan sebuah pergeseran paradigma fundamental dari pengelolaan yang sentralistik menjadi sistem yang partisipatif dan memberdayakan masyarakat.

Hasil penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa investasi kebijakan dan anggaran pada program-program berbasis komunitas seperti TPS3R dan Kompos Mandiri adalah langkah yang paling strategis dan efektif. Dengan menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak utama, didukung oleh regulasi yang fasilitatif dan insentif yang memotivasi, Kota Makassar dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bersih, tetapi juga efisien, berdaya, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.